

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Demi mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang ditegaskan pada alinea keempat pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Indonesia melaksanakan pembangunan baik berupa pembangunan infrastruktur maupun pembangunan Sumber Daya Manusia. Pembangunan dapat berjalan apabila didukung dengan adanya anggaran. Oleh sebab itu, Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun melalui undang-undang. Salah satu unsur pendapatan negara dalam APBN diperoleh dari hasil pungutan pajak dan pungutan lainnya seperti Bea masuk, Bea keluar dan Bea cukai.

Struktur sosial dan ekonomi, instansi memiliki peranan yang berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan. Secara umum, instansi bertindak sebagai satuan yang memiliki peran krusial dalam menjalankan berbagai kegiatan, baik dalam ranah publik maupun swasta. Jenis instansi sangat bervariasi, mencakup instansi pemerintah, instansi swasta, dan instansi pendidikan. Ketiganya memiliki peran masing-masing yang disesuaikan dengan tujuan instansi. Pada dasarnya, instansi pemerintah menjadi tulang punggung dari sistem administrasi negara yang bertugas memberikan pelayanan publik, termasuk membuat kebijakan. Organisasi sektor

publik atau pemerintah sejak awal pendiriannya sampai saat ini selalu berkomitmen untuk menjadi organisasi yang berguna bagi masyarakat dan senantiasa melayani masyarakat dengan banyak pelayanan baik dibidangnya. Direktorat Bea dan Cukai merupakan salah satu dari instansi pemerintah yang sangat menunjang dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor dan impor barang di daerah pabean.

Direktorat Bea dan Cukai yang merupakan salah satu dari instansi pemerintah yang sangat menunjang dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor dan impor barang di daerah pabean (Siregar, 2021). Peran tersebut memiliki kontribusi yang signifikan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi terutama dalam menggerakkan pertumbuhan disektor riil melalui kebijakan fiskal yang diarahkan terutama untuk peningkatan dan melindungi industri dan investasi dalam negeri, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional dengan adanya kebijakan dari Menteri Keuangan P-23/BC/2010. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan instansi pemerintah yang memiliki peran strategis dalam mengawasi lalu lintas barang yang keluar masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas utamanya mencakup pengawasan, pemeriksaan, dan memungut bea masuk serta cukai atas barang-barang impor dan ekspor.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai melakukan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai dengan cara pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran yang melakukan kegiatan kepabeanan dan cukai yang berada di wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai,

Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) tipe madya pabean B Sidoarjo merupakan salah satu instansi dibawah naungan Kementerian Keuangan, instansi ini setiap tahunnya menyusun laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja yang nantinya akan laporkan kepada kementerian keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban pengelolaan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Untuk dapat menjalankan seluruh kegiatan operasional Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Sidoarjo memiliki anggaran belanja satuan kerja sebagai pengeluaran instansi. Berikut merupakan data anggaran dan realisasi belanja satuan kerja Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Sidoarjo"

Tabel 1.1 Laporan Pagu Anggaran Modal Belanja Satuan Kerja Tahun 2020-2023  
Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Sidoarjo

Tahun	Belanja Satuan Kerja
	Anggaran
2020	Rp 15.227.174.000
2021	Rp 8.456.971.000
2022	Rp 6.439.893.000
2023	Rp 9.887.439.000

Sumber: Data Anggaran Belanja Satker (KPPBC) Sidoarjo

Untuk menjalankan fungsinya, instansi Bea Cukai membutuhkan alokasi anggaran yang memadai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran ini digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan operasional seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, hingga program kerja lainnya.

Anggaran di Bea Cukai sangat bergantung pada prioritas dan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Terkadang, terdapat keterbatasan anggaran atau pergeseran prioritas anggaran yang dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya keuangan untuk operasional Bea Cukai. Pemerintah memiliki banyak prioritas dalam pengalokasian anggaran negara pada kondisi fiskal negara yang terbatas, pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran, yang dapat berdampak pada alokasi anggaran untuk instansi bea cukai

Penyesuaian kebijakan anggaran yang terlihat dalam fluktuasi data anggaran tersebut mencerminkan upaya KPPBC Sidoarjo untuk mengelola sumber daya keuangan yang terbatas secara efisien dan efektif. Keterbatasan dana pemerintah menjadi faktor krusial yang mempengaruhi alokasi anggaran setiap tahunnya dimana sumber daya dialihkan ke sektor atau program yang dianggap paling mendesak atau memberikan dampak terbesar. Upaya meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran menjadi sangat penting dalam situasi dana yang terbatas. Kantor pelayanan dan pengawasan bea dan cukai Sidoarjo dituntut untuk memaksimalkan output dari setiap rupiah yang dibelanjakan.

Kinerja keuangan merupakan salah satu isu yang sangat penting untuk dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintahan, sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintah daerah diuntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan secara baik (Umam, 2023). Semakin meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga negara diharapkan dapat mengurangi terjadinya pemborosan, kebocoran dana dan

mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomi

Pengukuran atas kinerja dalam organisasi sektor publik atau pemerintah merupakan hal yang penting karena digunakan sebagai dasar untuk menilai akuntabilitas organisasi sektor publik dalam rangka menghasilkan pelayanan yang lebih baik dan tepat sasaran. Penganggaran menuntut semua instansi pemerintah untuk mampu menghasilkan kinerja keuangannya dengan baik. Semakin meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik diharapkan dapat meminimalisirkan terjadinya pemborosan, kebocoran dana dan mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomi (Kurniawati, 2016). Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Ulum, 2012).

*Value for money* merupakan tolak ukur dalam anggaran belanja suatu organisasi baik organisasi swasta maupun organisasi sektor publik yang meliputi penilaian ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. efisiensi dan efektifitas anggaran belanja merupakan salah satu prinsip dalam penyelenggaraan anggaran belanja suatu organisasi, agar dapat memberikan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal. Ekonomis: pemerolehan input dengan kualitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomis merupakan perbandingan input dengan input value yang

dinyatakan dalam satuan moneter. Efisiensi pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu untuk penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektifitas: tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Dalam suatu organisasi apabila menggunakan analisis *value for money*, indikator kinerja seharusnya menggambarkan suatu pencapaian tingkat pelayanan pada biaya ekonomi yang terbaik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Efisiensi dan Efektifitas Alokasi APBN Melalui Di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo 2020 - 2023."

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah daya guna (efisiensi) alokasi APBN kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Sidoarjo?
2. Bagaimanakah tepat guna (efektifitas) alokasi APBN kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Sidoarjo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian

ini yaitu :

1. Mengetahui dan Menganalisis daya guna (Efisiensi) alokasi APBN kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Sidoarjo!
2. Mengetahui dan menganalisis tepat guna (Efektifitas) alokasi APBN kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Sidoarjo!

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah :

1. Secara teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu manajemen keuangan tentang kinerja keuangan
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang peranan *value for money* di KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo sebagai bahan pertimbangan dan pembelajaran terkait penelitian dan sebagai referensi

